

UPAYA TEKAN CELAH PELANGGARAN

Kampung Panca Tertib Dilibatkan Awasi Peredaran Miras

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya turut melibatkan Kampung Panca Tertib dalam mengawasi peredaran minuman keras (miras) di wilayah. Terutama penjualan ilegal atau tidak sesuai persyaratan perizinan. Hal itu sebagai upaya untuk menekan celah pelanggaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan usai operasi terpadu terkait penjualan miras tak berizin pada akhir Oktober lalu pihaknya tetap melakukan pemantauan. "Termasuk melibatkan Kampung Panca Tertib untuk ikut mengawasi usaha penjualan miras yang telah ditutup dan peredaran miras secara ilegal. Hal ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Yogya tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol," urainya, Selasa (12/11).

Selain itu jajarannya juga melakukan edukasi dan penguatan Kampung Panca Tertib agar efektif dalam melakukan pengawasan peredaran miras ilegal. Di samping itu pengawasan terhadap tempat usaha penjualan miras ilegal yang sudah ditutup dan dilakukan penyegelan oleh Polresta Yogyakarta bersama Sat Pol PP Kota Yogya harus terus dilakukan.

"Kampung Panca Tertib kami minta menyampaikan informasi jika ada peredaran miras secara ilegal," tandasnya.

Sebelumnya, operasi terpadu selama dua hari yang digelar pekan lalu pihaknya mendapatkan 2.619 botol minuman beralkohol yang tidak berizin. Minuman beralkohol ilegal itu berasal dari sekitar 42 tempat usaha. Seluruh minuman beralkohol yang tidak berizin dilakukan penyitaan oleh Polsek setempat. Termasuk dilakukan penyegelan terhadap usaha atau tempat penyimpanan dengan memasang garis polisi. "Pelaksana operasi dari Polresta Yogyakarta dan kami memberikan du-

kungan personel," imbuhnya.

Octo menyebut operasi berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Operasi terpadu juga untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 terkait optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Instruksi Gubernur itu juga dijabarkan Pemkot melalui Surat Edaran(SE) Walikota Yogya Nomor 100.3.4/5346/SE/2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Terpisah Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengatakan SE tersebut sesuai arahan Instruksi Gubernur terkait optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. "Instruksi sudah ada, artinya ayo kita laksanakan saja. Kalau saya ikuti saja aturannya seperti apa. SE kota sudah ditandatangani. Memang Dawuh Ngarsa Dalem," katanya.

Dalam SE Walikota itu, upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melalui perangkat daerah terkait yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sat Pol PP, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan berkoordinasi dengan mantri pamong praja dan lurah untuk melakukan inventarisir terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, distributor, toko bebas bea maupun pelaku usaha lain yang melakukan peredaran, penjualan dan atau penyimpanan minuman beralkohol.

Sedangkan mantri pamong praja dan lurah diminta menginformasikan dan mensosialisasikan bahaya minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya kepada masyarakat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan Kampung Panca Tertib. (Dhi)-f

GEMPUR ROKOK ILEGAL
Sosialisasi Cukai
GRATISSSS!!!
NONTON BARENG
Kualifikasi Piala Dunia Round 3
JUMAT, 15 NOVEMBER 2024
Indonesia vs Jepang
Kick Off 19:00 WIB
Jogja City Mall
Acara dimulai 18:00 WIB
GERRsama!!!
Kelik Pelipur Lara vs Endah Sharaswati
No Alkohol, No Sajam, Jaga Kebersihan, Atribut Suporter

RUTIN LAKUKAN PEMANTAUAN DAN UJI SAMPEL

Bahan Pangan di Pasar Tradisional Dipastikan Aman

YOGYA (KR) - Keberadaan bahan pangan yang ada di pasar tradisional akan terus dipastikan keamanannya. Secara berkala Pemkot Yogya rutin melakukan pemantauan sekaligus uji sampel.

Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Yuanita Ari Astuti, menjelaskan pemantauan dan pengawasan terhadap bahan pangan tidak hanya di pasar rakyat melainkan juga toko retail. "Setiap bulannya, kami melakukan pemantauan dan pengawasan di pasar-pasar. Setidaknya pada satu pasar dilakukan tiga kali pengambilan sampel dalam satu tahun," jelasnya, Selasa (12/11).

Berdasarkan hasil sampel yang diambil dari beberapa pasar tradisional di Kota Yogya menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu aman untuk dikonsumsi. Meskipun terdapat beberapa temuan, masyarakat tidak perlu khawatir karena

Pemkot menaruh perhatian lebih dengan langsung menindaklanjuti. Sampel yang diambil di antaranya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSHP) sekitar 12 hingga 15 sampel untuk setiap jenisnya.

Pada beberapa kali uji sampel terhadap produk PSAH seperti daging ayam, kikiil sapi, dan bakso, menunjukkan hasil yang aman tidak terkontaminasi bahan atau daging lainnya serta bebas dari formalin atau bahan berbahaya lainnya. Sementara produk telur ayam dan telur bebek terbukti memenuhi standar kualitas baik yang menandakan kesegaran yang terjaga.

Untuk hasil uji pestisida

terhadap sayuran menunjukkan sampel seperti kentang, buncis, kubis, sawi hijau, hingga wortel, bebas dari residu pestisida. "Kebanyakan sayuran yang masuk ke Kota Yogya didominasi dari luar daerah jadi yang kami lakukan ialah memberikan edukasi kepada para pedagang untuk penanganan PSAT yang baik. Kontaminasi biasanya terjadi pada rantai produksi dan distribusi," imbuh Yuanita.

Dirinya juga memberikan tips sebelum mengolah sayuran untuk mencuci sayuran dengan air yang mengalir. Sayuran yang dicuci secara terpisah setiap jenis sayuran dan diusap perlahan di setiap bagian. Dengan cara ini, sayuran yang akan dikonsumsi men-

jadi lebih aman dan dapat mengurangi residu pestisida yang ada.

Sementara uji formalin terhadap PSHP produk ikan asin menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian besar ikan asin seperti ikan peda dan cumi telur bebas dari formalin. Namun ada beberapa produk seperti lajur kecil, cumi gepeng, dan teri nasi yang terdeteksi mengandung formalin melalui pengujian cepat atau rapid test. "Kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan akan melakukan penelusuran sumber bahan pangan tersebut diambil dari mana serta dilakukan pembinaan kepada pedagang. Kami juga memonitoring karena keamanan pangan ini sudah menjadi perhatian khusus. Pemantauan dan pengawasan rutin terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa ikan kering yang beredar di pasaran

aman dikonsumsi. Sementara Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan Bidang Ketersewaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Budi Santoso, menyebutkan pihaknya akan mengeluarkan surat untuk penarikan produk ikan kering



Pemantauan dan pengambilan sampel bahan pangan yang beredar di pasar tradisional. (KR-Istimewa)

dideteksi secara langsung apakah mengandung formalin atau tidak. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena keamanan pangan ini sudah menjadi perhatian khusus. Pemantauan dan pengawasan rutin terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa ikan kering yang beredar di pasaran

aman dikonsumsi. Sementara Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan Bidang Ketersewaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Budi Santoso, menyebutkan pihaknya akan mengeluarkan surat untuk penarikan produk ikan kering

yang terbukti mengandung bahan berbahaya.

"Kami akan langsung membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pedagang untuk tidak menjual produk tersebut. Kemudian kami telusuri agar para pedagang tidak membeli dari produsen tersebut," terangnya. (Dhi)-f

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN UTANG UMKM

Dorong Pemulihan Ekonomi, Buka Lapangan Kerja

YOGYA (KR) - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan aturan menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM mendapatkan respons positif. Karena kebijakan itu dinilai menjadi sinyal negara hadir untuk membantu dan memberdayakan UMKM di sektor-sektor tersebut. Dengan kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi UMKM dan membantu mereka agar lebih mandiri serta mampu bersaing.

"Kebijakan ini tidak hanya menjadi angin segar bagi petani, nelayan dan pelaku UMKM, tapi juga mendorong pemulihan ekonomi. Dengan penghapusan ini diharapkan bisa membuka peluang usaha atau dengan kata lain membuka lapangan

kerja. Apabila hal itu bisa diwujudkan dalam jangka panjang bisa mendatangkan manfaat bagi perekonomian," kata dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta MM CDMP di Yogyakarta, Senin (11/11).

Seperti diketahui bersama penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, yang memang sudah ada dalam daftar penghapusbukuan oleh himpunan bank-bank milik negara (Himbara). Jadi tidak semua UMKM di sektor tersebut mendapat penghapusan utang.

Widarta mengatakan, supaya kebijakan dari Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik dan tertib, serta menghindari adanya penyalahgunaan kebijakan, langkah-langkahnya perlu dibuat secara de-

tail dan diimbangi pengawasan yang cermat. Selain itu langkah baik apabila pemerintah mendata dengan cermat UMKM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghapusan utang, agar kebijakan ini bisa tepat sasaran. Pendataan merupakan salah satu hal yang penting, selain monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan utang ini.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memberi ruang lebih bagi UMKM untuk berkembang, terutama di sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan. Walaupun begitu harus tetap diimbangi dengan perencanaan yang detail dan matang. Dengan begitu selain UMKM bisa semakin berkembang dan meningkatkan kualitas diri, stabilitas keuangan perbankan serta perekonomian bisa tetap terjaga," jelasnya. (Ria)-f

BPBD DIY Minta Masyarakat Tingkatkan Mitigasi Bencana

YOGYA (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY terus menggiatkan upaya mitigasi bencana. Dimana salah satu bentuknya dengan terus mendorong kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Semua itu dilakukan dengan harapan masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi bencana, termasuk bencana hidrometeorologi yang bisa menjadi ancaman setiap saat.

"Peran masyarakat dalam penyelamatan diri sendiri dan lingkungan memiliki peran sangat signifikan. Bahkan berdasarkan data lebih dari 60 persen penyelamatan saat bencana dilakukan oleh masyarakat. Menyadari akan hal itu BPBD DIY semakin gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas," kata Ketua Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta,

Sabtu (9/11).

Dikatakan, sejak 24 Oktober DIY telah memasuki status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah. Diperkirakan kondisi itu akan berlangsung sampai Februari 2025. Terutama disekitar daerah di DIY yang rawan longsor seperti Gunungkidul dan Kulonprogo. Serta Kota Yogya dan Sleman yang juga rawan terhadap ancaman banjir. Oleh karenanya masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, pasalnya dalam beberapa waktu ke depan intensitas hujan masih tergolong tinggi.

DIY memiliki berbagai potensi bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, erupsi Gunung Merapi, kekeringan, tanah longsor dan banjir. Untuk itu kami mengimbau agar masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Selain itu dengan adanya status siaga darurat bencana hidrometeorologi perlu diimbangi peningkatan kewaspadaan," ungkapnya. (Ria)-f